



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK
REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC PASSPORTS AND SERVICE PASSPORTS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic on Visa Exemption for Holders of Diplomatic Passports and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic on Visa Exemption for Holders of Diplomatic Passports and Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2010 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Slovakia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Slovakia, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 78



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
PASPOR DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia, selanjutnya disebut "para Pihak".

MENIMBANG hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan tersebut lebih lanjut, secara timbal balik, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas Republik Indonesia dan Republik Slovakia ke masing-masing negara;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL sebagai berikut :

**PASAL I
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, dan tinggal di wilayah Republik Slovakia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pertama masuk dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.

2. Warga negara Republik Slovakia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari, sejak setiap tanggal ~~masuk~~.

PASAL 2

MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3

KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah Negara Pihak lainnya, di setiap titik yang diizinkan untuk maksud itu oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang secara hukum diterapkan kepada pemegang paspor yang berlaku tersebut.

PASAL 4

VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan pos konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (istilah "anggota keluarga" merujuk pada suami/istri dan anak-anak yang belum menikah berusia dibawah 25 tahun dan tidak bekerja dan orang tua yang menjadi tanggungan), wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 5

HAK PIHAK BERWENANG

1. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara masing-masing Pihak dari kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan Negara Pihak lainnya ketika memasuki wilayahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan berkenaan dengan masuk, tinggal, dan perginya orang asing.
2. Persetujuan ini tidak mempengaruhi hukum dan/atau peraturan yang berlaku di kedua negara yang terkait dengan keamanan and masuk, tinggal atau perpindahan orang asing.

3. Para Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang dianggap tidak dikehendaki atau dapat membahayakan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik.

PASAL 6

PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik.
2. Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam ayat (1) Pasal ini wajib segera diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 7

CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau paspor dinas di wilayah Pihak lainnya, mereka wajib segera memberitahukan kepada para pejabat yang berwenang di negara Pihak yang menerima. Misi diplomatik dan pos konsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan kepada orang dimaksud, sesuai dengan perundang-undangan nasional, suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan atau ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan oleh Para Pihak.

PASAL 9

PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (1) dari Persetujuan ini.

PASAL 10

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing perundang-undangan nasionalnya, telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

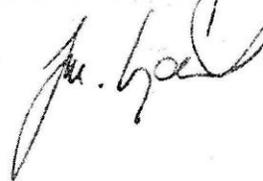
DIBUAT di ..*Jakarta*.. pada tanggal ..*dua puluh Sembilan*.. bulan ..*Maret*..... tahun 2010.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini dalam rangkap dua, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Slovakia, dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SLOVAKIA





REPUBLIK INDONESIA

DOHODA

MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU INDONÉZSKEJ REPUBLIKY O ZRUŠENÍ VÍZOVEJ POVINNOSTI PRE DRŽITEĽOV DIPLOMATICKÝCH PASOV A SLUŽOBNÝCH PASOV

Vláda Indonézskej republiky a vláda Slovenskej republiky ďalej len „zmluvné strany“,

berúc do úvahy priateľské vzťahy medzi oboma krajinami.

željúc si recipročne upevniť vzťahy uľahčujúce vstup držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Indonézskej republiky a Slovenskej republiky do ich príslušných krajín.

na základe platných vnútroštátnych právnych predpisov príslušných krajín.

dohodli sa t a k t o:

Článok 1

ZRUŠENIE VÍZOVEJ POVINNOSTI

(1) Štátni občania Indonézskej republiky, držiteľia platných diplomatických alebo služobných pasov môžu vstúpiť, prechádzať a zdržiavať sa na území Slovenskej republiky bez víz po čas nepresahujúci 90 (deväťdesiat) dní odo dňa prvého vstupu v rámci 180 (stoosemdesiatich) dní.

(2) Štátni občania Slovenskej republiky, držiteľia platných diplomatických alebo služobných pasov, môžu vstúpiť, prechádzať a zdržiavať sa na území Indonézskej republiky bez víz po čas nepresahujúci 30 (tridsať) dní odo dňa každého vstupu.

Článok 2

DĹŽKA PLATNOSTI PASOV

Dĺžka platnosti diplomatických alebo služobných pasov štátnych občanov každej zmluvnej strany je najmenej 6 (šesť) mesiacov v deň vstupu na územie štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3
PODMIENKY VSTUPU A VYCESTOVANIA

Držitelia platných diplomatických alebo služobných pasov každej zmluvnej strany uvedení v tejto dohode môžu vstúpiť a vycestovať z územia štátu druhej zmluvnej strany cez akýkoľvek hraničný priechod určený pre tento účel príslušnými migračnými orgánmi bez akéhokoľvek obmedzenia, s výnimkou obmedzení ustanovených v predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti, migrácie, colných otázok, zdravotných požiadaviek pri vstupe a iných predpisoch, ktoré sa môžu uplatniť na držiteľov týchto platných pasov.

Článok 4
VÍZUM ČLENOV DIPLOMATICKEJ MISIE A KONZULÁRNYCH ÚRADOV

Štátni občania každej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov a sú členmi diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na území štátu druhej zmluvnej strany, vrátane ich rodinných príslušníkov (pojem „rodinní príslušníci“ znamená manžel/manželka, slobodné deti do 25 rokov veku, nezamestnané a závislé od rodičov), získajú vstupné vízum od veľvyslanectva štátu druhej zmluvnej strany pred ich vstupom.

Článok 5
PRÁVA PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV

1. Táto dohoda nevyníma štátnych občanov jednej zmluvnej strany z povinnosti dodržiavať vnútroštátne právne predpisy štátu druhej zmluvnej strany pri vstupe na územie jej štátu.

2. Táto dohoda nemá vplyv na vnútroštátne právne predpisy oboch štátov týkajúce sa vnútornej bezpečnosti a podmienok vstupu, pobytu a odchodu cudzincov.

3. Zmluvné strany si vyhradujú právo odmietnuť vstup alebo skrátiť pobyt osobám, ktoré sú považované za nežiaduce alebo ktoré by mohli ohroziť verejný mier, verejný poriadok, zdravie obyvateľov, alebo bezpečnosť štátu.

Článok 6
PRERUŠENIE VYKONÁVANIA

1. Každá zmluvná strana môže prerušiť vykonávanie tejto dohody úplne alebo čiastočne z dôvodu bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo zdravia obyvateľov.

2. Zavedenie, ako aj ukončenie opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku sa bezodkladne oznámi druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.

Článok 7
VZORY A VYDANIE PASOV ALEBO CESTOVNÝCH DOKLADOV

1. Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory platných diplomatických a služobných pasov najneskôr do 30 (tridsiatich) dní po podpise tejto dohody.

2. V prípade zavedenia nových diplomatických alebo služobných pasov, ako aj zmien existujúcich, sa zmluvné strany navzájom informujú písomne diplomatickou cestou o akýchkoľvek zmenách najneskôr 30 (tridsať) dní pred ich zavedením do praxe.

3. V prípade štátnych občanov oboch zmluvných strán, ktorí stratili alebo poškodili svoje diplomatické alebo služobné pasy na území štátu druhej zmluvnej strany, bezodkladne o tom informujú kompetentné orgány prijímajúcej zmluvnej strany prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu ich štátu. Dotknutá diplomatická misia alebo konzulárny úrad vydá uvedeným osobám podľa vnútroštátnych právnych predpisov doklad na návrat do ich štátu.

Článok 8
RIEŠENIE SPOROV

Akýkoľvek rozdiel alebo spor vyplývajúci z interpretácie alebo vykonávania ustanovení tejto dohody sa rieši konzultáciami alebo rokovaniami medzi zmluvnými stranami.

Článok 9
ZMENY A DOPLNENIA

Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná, ak je to potrebné, vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny alebo doplnenia nadobudnú platnosť podľa ustanovenia článku 10 ods. 1 tejto dohody.

Článok 10
NADOBUDNUTIE PLATNOSTI, TRVANIE A VYPOVEDANIE

1. Táto dohoda nadobudne platnosť 30 (tridsať) dní odo dňa prijatia neskorsieho písomného oznámenia, ktorými si zmluvné strany diplomatickou cestou navzájom oznámia splnenie podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

(2) Táto dohoda je platná na obdobie 5 (piatich) rokov a automaticky sa platnosť predlžuje na ďalších 5 (päť) rokov.

(3) Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomným oznámením druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou najneskôr 90 (deväťdesiat) dní pred dňom vypovedania.

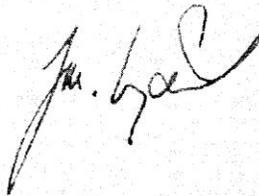
Dané v Jakarte dňa 29. Marca 2010.

NA DŮKAZ TOHO, podpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v indonézskej, slovenskej a anglickej jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v jazyku anglickej.

Za vládu
Indonézskej republiky



Za vládu
Slovenskej republiky





REPUBLIC INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS AND
SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic, hereinafter referred to as "the Contracting Parties".

CONSIDERING the friendly relations between the two countries:

DESIRING to further strengthen such relations, on a reciprocal basis, by facilitating the entry of holders of diplomatic or service passports of the Republic of Indonesia and the Slovak Republic into their respective countries:

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries:

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE I
VISA EXEMPTION

1. Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic or service passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Slovak Republic for a period of stay not exceeding 90 (ninety) days from the date of first entry during the period of 180 (one hundred eighty) days.

2. Nationals of the Slovak Republic, holders of valid diplomatic or service passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding 30 (thirty) days from the date of each entry.

ARTICLE 2

DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of diplomatic or service passport validity of nationals of either Contracting Party shall be at least 6 (six) months on the day of entry into the territory of the State of the other Contracting Party.

ARTICLE 3

ENTRY AND EXIT CONDITIONS

The holders of valid diplomatic or service passports of either Contracting Party referred to in this Agreement may enter into and depart from the territory of the State of the other Contracting Party at any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restrictions except for those stipulated in the security, migratory, customs, sanitary entry and other provisions which may be legally applicable to holders of such valid passports.

ARTICLE 4

VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSION OR CONSULAR POST

Nationals of either Contracting Party who are holders of valid diplomatic or service passports and assigned as members of diplomatic mission or consular post in the territory of the State of the other Contracting Party, including their family members (the term "family members" refers to husband/wife, unmarried children under the age of 25 years and who are unemployed and dependent parents), shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Contracting Party prior to their entry.

ARTICLE 5
RIGHTS OF AUTHORITIES

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Contracting Party from the obligation to respect the laws and regulations of the State of the other Contracting Party when entering into the territory of its State, including but not limited to the laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreigners.
2. This Agreement does not affect the applicable laws and/or regulations of the two States relating to internal security and the entry, stay or movement of foreigners.
3. The Contracting Parties reserve the rights to refuse admission to or shorten the stay of persons considered undesirable or likely to endanger public peace, public order, public health or national security.

ARTICLE 6
SUSPENSION

1. Each Contracting Party may temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, for reasons of national security, public order or public health.
2. The introduction as well as termination of the measures referred to in paragraph 1 of this Article shall immediately be notified to the other Contracting Party through diplomatic channels.

ARTICLE 7
SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

1. The Contracting Parties shall exchange, through diplomatic channels, within 30 (thirty) days after signing of this Agreement, the specimens of their valid diplomatic and service passports.
2. In case of introduction of new diplomatic or service passports, as well as, modifications of the existing ones, the Contracting Parties shall inform each other in

writing, through diplomatic channels, about any changes not later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.

3. In case of nationals of either Contracting Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the State of the other Contracting Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving Contracting Party through diplomatic mission or consular post of the State of their nationality. The diplomatic mission or consular post concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with national legislation, a document for returning to the State of their nationality.

ARTICLE 8

SETTLEMENT OF DISPUTE

Any difference or dispute arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Contracting Parties.

ARTICLE 9

AMENDMENTS

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual written consent of the Contracting Parties. Such amendment or revision shall enter into force according to the provision of Article 10(1) of this Agreement.

ARTICLE 10

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Contracting Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated by their respective national legislation, have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for period of 5 (five) years and shall be renewed automatically for further period of 5 (five) years.
3. Each Contracting Party may terminate this Agreement by giving written notification to the other Contracting Party through diplomatic channels at least 90 (ninety) days prior to the expected termination date.

DONE at Jakarta this twenty ninth day of March 2010.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement in two originals in the Indonesian, Slovak and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA



FOR THE GOVERNMENT
OF THE SLOVAK REPUBLIC

